

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lembaga keuangan syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, *bai' al-murābahah* diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi.¹

Mekanisme penerapan *murābahah* di LKS, didasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang/objek tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Untuk itulah maka nasabah berhubungan dengan LKS. Namun karena LKS pada umumnya tidak memiliki *inventory* terhadap barang/objek yang dibutuhkan nasabah, maka LKS melakukan pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lainnya seperti kepada *supplier* yang kemudian akan menjualnya kembali kepada nasabah pemesan dengan harga jual yang disepakati.² Pada saat sudah terjadi serah terima barang antara LKS dan nasabah debitur, maka kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran sesuai kesepakatan baik secara angsuran atau di akhir secara *lumpsum*.³

Baitul māl wa tamwīl (BMT) Amanah Ummah cabang Sukoharjo yang juga merupakan Lembaga Keuangan Syariah non bank, berfungsi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

¹ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 119

² *Ibid.*, hlm. 120.

³ *Ibid.*, hlm. 121.

umumnya.⁴ Sesuai dengan itu, maka BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo pun telah mengadakan produk penyaluran dana berupa pembiayaan dengan orientasi mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan BMT.⁵ Salah satu pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo maupun lembaga keuangan Islam lainnya adalah pembiayaan *murābahah*.

Pembiayaan *murābahah* yang terjadi antara pihak BMT dengan pihak nasabah selaku penjual dan pembeli barang terkadang tidaklah berjalan mulus atau sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Biasanya ada pihak yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam kontrak, terutama dari pihak nasabah yang mengidap *character risk* (karakter buruk) yaitu nasabah mampu yang melakukan wanprestasi atau cidera janji dengan cara sengaja menunda-nunda proses pembayaran kepada pihak BMT untuk melunasi hutang, sehingga berujung pada kerugian pihak BMT. Berdasarkan pemaparan menejer BMT Amanah Ummah bahwa sampai di tahun 2016 total pembiayaan bermasalah adalah 3 % dari jumlah 100 milyar perputaran uang.⁶

Oleh sebab itu, untuk menangani nasabah wanprestasi, maka sanksi dianggap perlu dikenakan kepada pihak nasabah yang tidak beriktikad baik. Sanksi tersebut didasarkan pada prinsip *ta'zīr*, yaitu bertujuan agar

⁴ <http://www.bmtaum.co.id/profile/selayang-pandang.html> diakses pada hari kamis 25 Agustus 2016 pukul 11:29 WIB

⁵ Muhamad Hidayat, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 119.

⁶ Wawancara dilakukan dengan Menejer Utama BMT Amanah Ummah pada hari Jumat, 17 Juni 2016 pukul 13.20 di BMT Amanah Ummah.

nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.⁷ Biasanya sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.⁸

Sebagai sebuah lembaga bisnis yang bergerak berdasarkan prinsip syariah, bukan berarti BMT melakukan tindak gegabah dengan sewenang-wanangnya menerapkan sanksi tanpa memperhatikan aspek-aspek kesyariahan, oleh sebab itu fatwa DSN-MUI sebagai payung hukum LKS, sudah seharusnya menjadi acuan sekaligus pedoman BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo dalam melakukan pelbagai macam kegiatan bisnis.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan beberapa ketentuan penerapan sanksi yang dapat dilaksanakan oleh LKS. Yakni mencakup jenis nasabah yang dapat dikenakan sanksi, jenis nasabah yang tidak diperbolehkan dikenakan sanksi, bentuk sanksi dan upaya lanjut pelaksanaan sanksi.

Dari latar belakang diatas, maka penulis merasa perlunya mengetahui kesesuaian antara penerapan sanksi yang dilaksanakan BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo terhadap nasabah wanprestasi pada akad *murābahah* dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Oleh sebab itu maka penulis hendak melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Penelitian ini berjudul: “Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Wanprestasi Nasabah Pada

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah, (UU dibidang perbankan, fatwa DSN-MUI, dan peraturan bank Indonesia)*, (Yogyakarta:UIN Press, 2007), hlm. 156.

⁸ *Ibid.*, hlm. 156.

Akad *Murābahah* di BMT Amanah Ummah Cabang Sukoharjo” (Studi Atas Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dan untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis mengemukakan pokok masalah sebagai berikut: Apakah penerapan sanksi terhadap wanprestasi nasabah pada akad *murābahah* di BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan sanksi yang diterapkan oleh BMT Amanah Ummah cabang Sukoharjo terhadap nasabah wanprestasi pada akad *murābahah* dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tentang analisis penerapan sanksi terhadap wanprestasi nasabah pada akad *murābahah* di BMT AUM cabang Sukoharjo adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah penambah wawasan serta pengetahuan di bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah mengenai standar operasional prosedur dalam penerapan sanksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

khususnya di BMT berdasarkan fatwa DSN. Selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan atas pembandingan bagi penelitian selanjutnya dalam pembahasan sejenis.

b. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terutama bagi lembaga sejenis untuk menetapkan kebijakan kedepan dalam menerapkan sanksi kepada nasabah wanprestasi, khususnya pada akad *murābahah*.